

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

*Fadel Machmud¹
Marthen Kimbal²
Frangky Rengkung³*

Abstrak

Kebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang berada di wilayah pesisir hingga saat ini terus dilaksanakan, bahkan berbagai program telah dicetuskan pemerintah agar dapat memberdayakan masyarakat pesisir dan mengurangi tingkat kemiskinan. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang berpedoman pada peraturan di atas adalah salah satu program unggulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dinas kelautan dan perikanan kabupaten kepulauan sangihe. Peneliti menggunakan metode kualitatif, informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Penilaian Implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dinas kelautan dan perikanan kabupaten kepulauan sangihe menggunakan empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir terdapat masalah pada 3 indikator utama yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, dan Struktur Birokrasi. Pada indikator Disposisi belum dapat dikatakan ada masalah pada sikap dari pembuat kebijakan karena berdasarkan hasil wawancara bahwa sikap dari pembuat kebijakan yang loyal dan baik dalam segala hal itu hanya terdapat padanya. Artinya belum di temukan masalah. Kemudian pada tiga indikator lainnya memang terdapat masalah karena pada sumber utama masalahnya ada pada sumberdaya yang masih kurang, tidak memadai, dan tidak konsisten dalam kerjanya sehingga dapat menimbulkan masalah pada struktur birokrasinya dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik antar bidang dan lainnya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri menyiapkan program unggulan untuk menopang Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Program yang dimaksudkan yaitu, Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, Program pengembangan budidaya perikanan, Program perikanan tangkap, Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Program-program ini juga merupakan program aplikatif untuk wilayah kecamatan maupun kampung/kelurahan. Namun selain program dari Dinas Kelautan dan Perikanan disejumlah kecamatan di Sangihe juga telah turun program yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Penelitian ini akan memfokuskan pada Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, menjadi kajian yang sangat menarik karena program tersebut yang terlihat nyata untuk pemberdayaan suatu masyarakat dan program tersebut dapat dirasakan masyarakat terutama masyarakat pesisir. Dengan adanya kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk masyarakat ini kiranya bisa mengembangkan tempat mata pencaharian masyarakat pesisir. Namun dalam kenyataannya penyediaan sarana dan prasarana untuk masyarakat pesisir belum sepenuhnya merata. Melihat perkembangan setiap tahunnya program ini berjalan, implementasi suatu kebijakannya terdapat permasalahan-permasalahan yaitu, Pembagian mesin untuk para nelayan, pembagian perahu pamo, dan pembagian jaring penangkap ikan belum merata artinya, sesuai dengan programnya pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat pesisir, terlebih khususnya yang mendapatkan

bantuan juga harus masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir namun dalam implementasinya tidak sepenuhnya merata. Permasalahan ini akibat dari pemerintah yang hanya membuat kebijakan tetapi belum nyata untuk masyarakat, yang harusnya ada upaya pemerintah untuk dapat terjun langsung dalam implementasi suatu program tersebut agar tidak menjadi masalah dalam pemerataan suatu program tersebut.

Tinjauan Pustaka

Implementasi sebagai suatu konsep tindak lanjut pelaksanaan kegiatan cukup menarik untuk dikaji oleh cabang-cabang ilmu. Hal ini semakin mendorong perkembangan konsep implementasi itu sendiri, disamping itu juga menyadari bahwa dalam mempelajari implementasi sebagai suatu konsep akan dapat memberikan kemajuan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan yang telah diputuskan. Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktifitas yang terlihat setelah adanya pengarah yang sah dari satu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila Program/Kebijakan sudah dibuat maka

program tersebut harus dilakukan oleh para aparat kepentingan. Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target yang ingin dicapai. Implementasi sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves dalam bukunya Solichin Abd. Wahab (2008:187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: implementasi itu mencakup *“a process of moving toward a policy objective by means of administrative an political steps”*. Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan publik disebut *“policy delivery system”* (sistem penyampaian/penelusuran kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang atau didisain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Menurut Lester dan Stewart bahwa implementasi adalah, Sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. (Lester dan Stewart dalam Kusumanegara, 2010:97). Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif. (Kusumanegara, 2010:97). Pandangan Lester dan Stewart juga Kusumanegara di atas, bahwa dalam proses implementasi perlu beberapa tahapan atau alur proses yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur agar

kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan.

Secara etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam Bahasa Yunani dan Sansekerta polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Pertengahan policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Menurut kamus besar Kamus Besar Indonesia (KBBI) Kata Kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan juga dapat berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan. James E. Anderson menyebutkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok pelaku terkait dengan suatu permasalahan tertentu. (Sudiyono, 2007:4). Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan juga menyebutkan kebijakan merupakan sebuah program yang diarahkan pada tujuan, nilai, dan praktek. Artinya kebijakan merupakan sebuah program yang disusun berdasarkan tujuan, termasuk nilai-nilai pembuat kebijakan dan fisibilitas dalam praktek. Dengan demikian kebijakan mengandung unsur fisibilitas teknis, sosial, dan politik. (Sudiyono, 2007:3). Menurut Ealau dan Pewitt (1973) (Edi Suharto, 2008), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang

membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (1974) (Edi Suharto, 2008), kebijakan adalah prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2005:57). Dengan kata lain kemungkinan terjadinya pemberdayaan sangat tergantung pada hal:

1. Kekuasaan dapat berubah. jika kekuasaan tidak dapat berubah maka pemberdayaan tidak akan mungkin terjadi dalam keadaan apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada

keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang baik bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam memenuhi tugas – tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal seperti mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal seperti di tinas oleh struktur sosial yang tidak adil (Suharto, 2005:58). Untuk mengetahui fokus pemberdayaan secara operasional perlu diketahui beberapa indikator pemberdayaan yang dapat menunjukkan orang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat di konsentrasikan pada aspek aspek apa saja dari sasaran perubahan Masalahnya dalam hal ini masyarakat pesisir.

Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan (Suharto, 2005: 63).

1. Kebebasan mobilitas: Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika ia mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil, merupakan kemampuan

individu untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, kebutuhan dirinya sendiri seperti rokok, minyak rambut dan lain-lain. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini teruma ketika ia membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih lagi jika ia menggunakan uangnya sendiri.

3. Kemampuan membeli komoditas besar, merupakan kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier, seperti tv, lemari, baju dan lain-lain. Seperti hal indikator diatas, poin tinggi kepada individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin kepada pasangannya, terlebih jika ia menggunakan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan seperti mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama anggota keluarga mengenai keputusan-keputusan keluarga.
5. Kebebasan relatif dan dominasi keluarga.
6. Kesadaran hukum dan politik.
7. Keterlibatan dalam kampanye ataupun protes-protes.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga ; memiliki rumah, tanah, aset produktif maupun tabungan.

Dalam konteks sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu (Suharto, 2005:66):

1. Aras mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utama adalah membimbing atau melatih

klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya

2. Aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelompok dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien dalam memecahkan permasalahannya.
3. Aras makro. Pendekatan ini di sebut juga sebagai strategi sistem besar (Large - system strategy), karena sasaran perubahan di arahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi - situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Masyarakat dapat di artikan dalam dua konsep, yaitu (Mayo, dalam Suharto, 2005 : 39):

1. Masyarakat sebagai sebuah "tempat bersama" , yakni sebuah wilayah geografi yang sama.
2. Masyarakat sebagai "kepentingan bersama", yakni kesamaan berdasarkan kebudayaan dan identitas.

Menurut pedoman umum penataan ruang pesisir dan pulau - pulau kecil, wilayah pesisir di definisikan sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut. Kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun

terendam air yang masih di pengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan kewilayah laut mencakup bagian laut yang masih di pengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimenasi dan aliran air tawar maupun yang di sebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti pemundulan hutan dan pencemaran. Ditinjau dari garis pantai, suatu wilayah pesisir memiliki dua kategori besar; yaitu yang sejajar dengan garis pantai (longshore) dan batas yang tegak harus dengan garis pantai (crossshore). Definisi di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat garis batas yang nyata wilayah pesisir. Batas tersebut hanyalah garis khayal yang letaknya di tentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di tempat yang lain, garis ini dapat berada jauh dari garis pantai, dan sebaliknya untuk wilayah yang terjal.

Metodologi Penelitian

Metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Moleong (2006) mengatakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskripsi dalam bentuk laporan dan uraian.

Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan program yaitu program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir maka penulis memfokuskan diri pada beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan

suatu kebijakan sebagaimana yang dikutip dari pendapat George Edward III (Leo Agustino (2006) mencatat terdapat empat Faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Oleh karenanya, Edward III menyarankan untuk memberikan perhatian kepada empat isu utama : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Sangehe dengan indikator Komunikasi, dapat di bilang bahwa komunikasi yang terjalin dari pihak Dinas terhadap masyarakat cukup baik apalagi berbicara mengenai program yang di laksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan ,yaitu memberikan bantuan berupa Mesin dan alat-alat kerja nelayan, terdapat respon yang baik dari masyarakat mengingat ini adalah program pemberdayaan unggulan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat dapat di penuhi oleh dinas dengan terimplementasinya program ini. Berdasarkan hasil wawancara di atas ada beberapa yang pro dan kontra dalam hal ini bagaimana komunikasi yang terjalin antara dua pihak ini. Komunikasi sudah berjalan dengan baik namun masih saja terjadi masalah pada implementasinya artinya belum ada kesepakatan antara dari Pihak Kepala Dinas dan Staf terhadap masyarakat, karena suatu kebijakan atau program yang di komunikasikan dengan baik maka akan berjalan dengan baik pula.

Sumberdaya atau staf yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Sudah sesuai dengan bidang masing-masing dan sesuai dengan kompetensinya ini menurut bapak Kadis yang sebagai pembuat kebijakan, namun kenapa masih saja terjadi masalah dalam pengimplementasi suatu program, itu di karenakan adanya staf yang tidak cukup memadai atau tidak kompeten di bidangnya. Dari beberapa hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa mereka melihat hanya secara kasat mata dan nampaknya sudah cukup baik, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak baik. Sedangkan dari Staf ahli sendirilah yang mengatakan bahwa masih kekurangan personil dari setiap bidang karena di bandingkan dengan kerja mereka yang sangat banyak, stafnya sangat tidak memadai karena tidak cukup banyak. Kalau masalah kompetensinya, dari pihak Dinas hanya melihat dari latar pendidikan saja. Entahlah apakah mereka di berikan pelatihan khusus atau tidak, tetapi sesuai dengan wawancara di atas tidak adanya pelatihan khusus. Sehingga tidak dapat terlihat bagaimana sumberdaya yang memiliki kompetensi, integritas yang kuat, moralitas yang baik, dan kemauan untuk mengabdikan pada daerah ini khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan yang dalam hal ini ialah Kepala Dinas sebagai pemimpin dalam suatu organisasi, menurut masyarakatnya sangat baik dan tanggap dalam menanggapi seluruh keluhan yang di berikan, berdasarkan hasil wawancara di atas ada yang mengatakan bahwa begitu baiknya sikap yang di berikan oleh Kadis terhadap masyarakat dan stafnya, begitu pula stafnya yang cukup baik dalam pelaksana suatu program yang bersifat

memberdayakan masyarakat, apalagi dalam pelayanan pembuatan Surat-surat di kantor Dinas. Tetapi kenapa masih bisa terjadi masalah? Itulah yang menjadi tanda tanya besar di benak masyarakat saat ini. Seharusnya dari pihak pelaksana kebijakan program harus adanya sifat keterbukaan terhadap masyarakat.

Struktur Birokrasi yang sudah teratur dalam sebuah organisasi yang dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, menurut Kadis ini adalah sebuah sistem yang tidak akan pernah terputus, dan dia bagaikan rantai jikalau ada satu yang terputus maka proses berjalannya akan terhambat, struktur birokrasi yang ada di Dinas kelautan dan perikanan saling terhubung antara Bidang satu dan lainnya, seperti ketika ada usulan program yang masuk maka akan saling kordinasi dari setiap bidang. Menurut masyarakat, sesuai dengan kasat mata mereka bahwa memang sudah baik. Tetapi kenapa masih saja ada masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya? Tentu itu ada kaitannya dengan struktur yang ada di Dinas kelautan dan perikanan karena ketika mereka mengeluarkan suatu program pasti akan saling terhubung antara satu dan lainnya.

Kesimpulan

1. Komunikasi, antara pihak pembuat kebijakan atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan pelaksana kebijakan atau Staf yang ada di dalamnya, belum terjalin komunikasi yang baik sehingga masih terjadi kendala dalam pelaksanaan program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
2. Sumberdaya, staf-staf yang ada dalam Dinas Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya memadai karena dengan keterbatasan

dan kurangnya sumberdaya yang ada. Kemudian juga dengan tidak konsistennya dalam bekerja sehingga terdapat masalah pada implementasi kebijakan.

3. Disposisi, atau sikap yang nampak dari pembuat kebijakan terhadap masyarakat yang cukup baik sesuai dengan apa yang di rasakan masyarakat, sikap yang loyal, tanggung jawab, dan penuh perhatian terhadap masyarakat sehingga tidak dapat di katakan ada masalah pada kebijakannya.
4. Struktur Birokrasi, birokrasi yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan ini masih belum berjalan dengan baik di karenakan masih ada oknum oknum yang tidak bekerja sesuai dengan sistem yang telah di tetapkan sebelumnya.

Saran

1. Diharapkan agar dapat menjalin Komunikasi dengan baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dan khususnya untuk para pelaksana kebijakan dalam setiap kegiatan yang di buat harus selalu di informasikan kepada pembuat kebijakan ataupun masyarakat agar dalam pelaksanaan program untuk masyarakat tidak lagi terdapat masalah dalam implementasinya.
2. Kiranya bagi sumberdaya yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan harus konsisiten dalam pekerjaannya, dan bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, agar tidak terdapat lagi masalah dalam pengimplementasian suatu program dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
3. Kiranya struktur birokrasi yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan ini harus bekerja sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan dan sesuai

dengan bidang masing masing yang sudah tercantum dalam strukturnya, juga harus di hilangkan oknum oknum yang dapat menjadi kendala dalam berjalannya sistem yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Dwidjowijoto, R. N,(2008), Analisis Kebijakan, Jakarta, Elex Media Komputindo
- Miles, M. B dan Huberman, A. M. (2007). Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, J. L. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2011. Metode Research Penelitian Ilmiah. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Solichin, A. W 2008, Analisi Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Subarsono, A. G 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suharto , E. 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sugiyono.(2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B. Bandung: Aflabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).Bandung : Alfabeta
- Silalahi, U. 2012. Metode Penelitian Sosial.Bandung: Refika Aditama.

Sudiyono.(2007).Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan. Buku Ajar.

Suharto, E. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik.Bandung: Alfabeta

Winarno, B. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita

Winarno, B. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).

Undang–Undang Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 40/Permen-KP/2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.